

Volume 6 Nomor 1 April 2021

e-ISSN 2541-0938  
p-ISSN 2657-1528

# JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME  
6

NOMOR  
1

SINTANG  
APRIL  
2021

e-ISSN  
2541-0938  
p-ISSN  
2657-1528



**MODEL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BERBASIS KOMODITI UNGGULAN  
MASYARAKAT ENTIKONG KALIMANTAN BARAT PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**

Kardius Richi Yosada✉

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia

✉Corresponding Author: richiyosada78@gmail.com

*Article History :*  
Received December 2020  
Accepted March 2021  
Published April 2021

*Keywords: Development  
Model and Strategy,  
Leading Commodity,  
Entikong Community*

**Abstract:** *The vast area of border between Indonesia and Malaysia in West Kalimantan would require the support of border management systems are organized and professional, both at the central and regional levels. However, the lack of infrastructure in the border area has shown that the government does not have a good border management system. During this time, the responsibility for the management of border areas is merely coordinative between ministerial and non-ministerial government agencies, without a government agency directly responsible for border management from the central to regional levels. The approach used in this research is qualitative phenomenology with Existing Models. The form of Phenomenology Research used in this study has 4 steps, namely analyzing the phenomena that occur, determining the context, collecting data and field notes. The results of this study are the formation of the development and development of smallholder plantations in the form of Model for developing smallholder plantations in Entikong District can be divided into four types based on commodities, namely: 1) Pure Plantation Areas, Mixed Plantation Areas, Multipurpose Plantation Areas, Integrated Plantation Areas.*

Sejarah Artikel  
Diterima: Desember 2020  
Direvisi: Maret 2021  
Diterbitkan: April 2021

Kata kunci: Model dan  
Strategi Pengembangan,  
Komoditi Unggulan,  
Masyarakat Entikong

**Abstrak:** Luasnya wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik. Selama ini, tanggung jawab pengelolaan wilayah perbatasan hanya bersifat koordinatif antar lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, tanpa ada sebuah lembaga pemerintah yang langsung bertanggung jawab melakukan manajemen perbatasan dari tingkat pusat hingga daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi dengan *Existing Models*. Bentuk Penelitian Fenomeologi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 4 langkah yaitu analisis fenomena yang terjadi, menentukan konteks, pengumpulan data dan catatan lapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah terbentuknya pengembangan dan pembinaan perkebunan rakyat berbentuk Model pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kecamatan Entikong dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan komoditas yaitu: 1) Kawasan Perkebunan Murni (KPM), Kawasan Perkebunan Campuran (KPC), Kawasan Perkebunan Serbaguna (KPS), Kawasan Perkebunan Terpadu (KPT).

How to Cite: Yosada, K.D., (2021), *Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Komoditi Unggulan Masyarakat Entikong Kalimantan Barat Perbatasan Indonesia-Malaysia*. JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 6 (1). 74-84. DOI: <https://doi.org/10.31932/jpe.v6i1.1064>



## PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional (BKPM, 2011).

Luasnya wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik. Selama ini, tanggung jawab pengelolaan wilayah perbatasan hanya bersifat koordinatif antar lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, tanpa ada sebuah lembaga pemerintah yang langsung bertanggung jawab melakukan manajemen perbatasan dari tingkat pusat hingga daerah. Selama beberapa puluh tahun kebelakang masalah perbatasan masih belum mendapat

perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Entikong dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan Entikong masih belum diprioritaskan. Hal ini menyebabkan kurang adanya daya tarik bagi para pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonominya di wilayah perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia (BKPM, 2011).

Peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dimiliki oleh Entikong. Kawasan ini merupakan kawasan perbatasan yang paling tinggi aktivitas ekonominya di sepanjang Kalimantan Barat – Serawak (Kompas, 2003). Aktivitas ekonomi tersebut sebagian besar adalah sektor perdagangan yang tumbuh akibat terbukanya pintu lintas batas formal Entikong – Tebedu (Serawak) sejak tahun 1991. sebagai pintu lintas batas, kawasan ini menjadi pintu masuk dan pintu keluar bagi arus perdagangan yang terjadi antar wilayah, serta menjadi lokasi yang strategis bagi kegiatan perekonomian. Posisi Entikong yang strategis dan adanya akses formal perbatasan menyebabkan pergerakan komoditas barang dan manusia mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada arus masuk maupun keluar. Dari sisi pergerakan manusia, cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata arus masuk lebih tinggi dari arus keluar. Peningkatan pergerakan disebabkan oleh berubahnya fungsi pos pelintas batas yang tidak hanya dilalui oleh pelintas tradisional



tetapi disebabkan pula oleh pelintas non tradisional (Kurniadi, 2009).

Fokus lain dalam kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan selain adanya komplementaritas ekonomi adalah adanya potensi pasar. Niebuhr dan Stiller, (2001) berpendapat bahwa pertumbuhan potensi pasar di kawasan perbatasan yang terintegrasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan regional dan peningkatan tenaga kerja, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Dalam konteks kawasan perbatasan Entikong, berbagai potensi kegiatan ekonomi sudah sejak lama dimiliki, namun kondisi tersebut belum berkembang sebagai sebuah kawasan yang memiliki keuntungan. Sebagai poin penting dari kedekatan secara geografis dengan negara tetangga. Kawasan ini merupakan kawasan strategis nasional yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan *Border Development Centre* sesuai dengan RTRW Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004, meskipun kedekatan secara spasial dan pasar wilayah tetangga menunjang dalam pengembangan kawasan tersebut. Beberapa contoh kasus di kawasan perbatasan darat menunjukkan bahwa dampak terbukanya kawasan perbatasan antar negara memiliki potensi dalam pengembangan kegiatan ekonomi di kedua wilayah yang berbatasan. Peran terbukanya akses formal Entikong – Tebedu (Serawak) sejak tahun 1991, merupakan langkah penting dalam kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan. Diresmikannya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) dari semula Pos Lintas Batas (PLB), menjadikan Entikong sebagai pintu masuk dan keluar antar negara

(Indonesia – Malaysia) yang berlaku secara internasional

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, kawasan perbatasan secara politis dianggap sebagai kawasan yang rawan terhadap penyelundupan, penyusupan, ataupun kegiatan kriminal lainnya yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan Negara. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan melalui pendekatan keamanan (*safety belt approach*), sehingga setiap kawasan perbatasan dijaga oleh aparat keamanan. Selain itu, ada pula anggapan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan belakang. Akibat dari anggapan-anggapan di atas, masyarakat Indonesia di sepanjang kawasan perbatasan menjadi terisolir dari keramaian pembangunan. Hal ini bisa dilihat pada kehidupan masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan, termasuk masyarakat di kawasan perbatasan Entikong.

Sebelum PPLB Entikong dibuka sebagai pintu resmi perdagangan internasional, keadaan wilayah di sepanjang kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda, tetapi sekarang menjadi sangat berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi yang sangat jauh berbeda membuat penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong yang terisolasi akses kehidupan sehari-harinya cenderung berorientasi ke negara tetangga Malaysia yang mempunyai sarana dan prasarana yang jauh lebih lengkap serta kegiatan ekonomi yang lebih maju. Apalagi kebanyakan darimereka terdiri dari suku-suku yang masih serumpun dan bersaudara dengan masyarakat di negara tetangga Serawak Malaysia. Batas wilayah negara itulah



yang memisahkan kewarganegaraan mereka (Husnadi, 2006).

Kesenjangan sosial ekonomi telah menjadi salah satu pemicu gangguan keamanan di sepanjang kawasan perbatasan yang melibatkan masyarakat setempat untuk berkolusi dengan oknum-oknum dari negara tetangga. Para cukong yang tinggal di negara tetangga Malaysia memanfaatkan kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan Entikong untuk mengeksploitasi hasil hutan. Sudah bukan rahasia lagi, penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, khususnya hasil hutan, secara besar-besaran di sepanjang kawasan perbatasan tidak lepas dari himpitan hidup masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong yang semakin berat. Masyarakat yang berdiam di sepanjang kawasan perbatasan selama ini tetap miskin, tidak jauh berbeda dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Sebaliknya, bagi saudara mereka yang tinggal di perbatasan negara tetangga Malaysia mengalami kemajuan yang pesat sejalan dengan keberhasilan pembangunan di negaranya (Husnadi, 2006).

Bertitik tolak dari pengalaman di atas, maka pola kebijakan pembangunan kawasan perbatasan berubah menuju pola keseimbangan (*equilibrium*) dari semula hanya pendekatan keamanan (*security approach*) menuju kepada pendekatan kemakmuran (*prosperity approach*) dengan porsi yang seimbang berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan Kecamatan Entikong, beberapa isu strategis yang dapat menjadi tolak ukur pengembangan di masa yang akan datang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Terbatasnya Fasilitas dan Utilitas di Kawasan Perbatasan Entikong

Fungsi daripada kawasan perbatasan umumnya ditunjukkan oleh adanya fasilitas CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*). Dalam konteks kawasan perbatasan di Entikong khususnya, fungsi ini umumnya diletakkan pada Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Selain fasilitas khusus kawasan perbatasan tersebut, juga diperlukan fasilitas penunjang lainnya seperti akomodasi, transportasi, air bersih, pasokan energi listrik dan lain sebagainya. Hingga saat ini, fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan perbatasan Entikong masih dalam standar pelayanan lokal dan sangat terbatas, sehingga kesan bahwa kawasan perbatasan Entikong sebagai pintu gerbang menuju negeri Serawak Malaysia tidak tercermin dari kondisi fasilitas dan utilitas yang dimilikinya. Justru yang terjadi bahwa kawasan perbatasan Entikong merupakan *hinterland* dari Serawak Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat di kawasan perbatasan Entikong yang berorientasi ke negara tetangga Malaysia, baik dalam memasarkan hasil buminya, memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun mencari pekerjaan karena akses internal ke kota Kecamatan Entikong dan ke kota Kabupaten Sanggau masih sangat terbatas (Husnadi, 2006).

#### 2. Tidak Seimbangnya Perkembangan Wilayah Antar Kota Perbatasan

Hubungan antar wilayah yang saling menguntungkan umumnya terjadi jika kedua wilayah memiliki tingkat perkembangan yang relatif seimbang. Hal ini terkait dengan posisi tawar (*bargaining power*) setiap wilayah dalam menjalankan kerjasama yang disepakati bersama.



Ketidak seimbangan tingkat perkembangan dapat mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan dan nilai keuntungan yang diperoleh dari kerjasama yang dijalankan.

Dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong, fakta menunjukkan bahwa pola hubungan yang terjadi antara masyarakat perbatasan yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong dengan Serawak Malaysia cenderung mengarah pada pola interaksi yang tidak seimbang. Indikasi ketidak seimbangan ini terlihat dari lemahnya posisi tawar masyarakat dalam berbagai kasus, seperti kasus yang berkaitan dengan TKI di Malaysia.

Sistem infrastruktur antara lain prasarana jalan, telekomunikasi, listrik dan air bersih di kawasan perbatasan Serawak telah terpenuhi dengan baik. Sementara itu, di kawasan perbatasan Entikong infrastruktur yang ada masih sangat terbatas. Prasarana jalan yang ada sebagian besar masih berupa jalan tanah dan itupun belum seluruhnya menjangkau seluruh desa yang ada, pasokan listrik juga masih terbatas di ibu kota Kecamatan, pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan secara individu maupun komunal dengan memanfaatkan sumber air gunung dan sungai, bahkan jaringan komunikasi baru di sekitar kota Kecamatan Entikong dan sama sekali belum dapat menjangkau desa-desa di sekitarnya, sebagai contoh, desa Pala Pasang dan desa Suruh Tembawang. Akibat keterbatasan dan perbedaan sarana prasarana, maka arah pergerakan orang dan barang secara otomatis mengalir dari Indonesia ke wilayah Malaysia (Profil Kecamatan Entikong, 2014). Hilangnya Kekayaan Alam Secara Terselubung.

Dalam teori ekonomi regional, sudah menjadi hipotesis umum bahwa

ketidakseimbangan hubungan antara dua wilayah yang tidak seimbang akan membawa dampak negatif berupa terjadinya proses *backwash effects* yang sangat merugikan wilayah yang lemah. Dalam hal ini, proses tersebut dapat direpresentasikan dengan tersedotnya berbagai sumberdaya milik wilayah yang lemah oleh wilayah yang lebih kuat kemampuan ekonominya (Husnadi, 2006).

Indikasi terjadinya aliran terselubung kekayaan alam dari kawasan perbatasan Entikong ini dapat dianalisis dari kebijakan pemerintah Indonesia yang secara tegas melarang ekspor kayu gelondongan ke luar negeri. Namun dalam kenyataannya, proses aliran ini masih terus terjadi. Ironisnya pasokan kayu dari hutan di kawasan perbatasan Entikong menjadi bahan dasar utama bagi industri furnitur dan kayu lapis di Serawak yang kebanyakan dari pekerjanya adalah TKI dari Indonesia (BPP Kabupaten Sanggau, 2014).

Selain akibat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap *illegal logging*, proses ini juga terjadi karena situasi di lapangan yang memang sulit untuk dikontrol. Sistem transportasi yang sangat minim, terutama di darat dan udara, mengakibatkan proses penghilangan kekayaan alam sulit dideteksi keberadaannya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali sejauh mana kawasan perbatasan dapat dikembangkan, sehingga potensi kekayaan alam yang ada dapat dikelola demi keuntungan bangsa dan negara secara lebih nyata (Husnadi, 2006).

### 3. Esensi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pengembangan wilayah secara umum merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan desentralisasi yang berorientasi pada pemecahan masalah



ketertinggalan dan ketimpangan antar wilayah dalam tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang terpusat telah berdampak terhadap kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan kemandirian pemerintah daerah. Pada era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk dapat mengelola dan mampu mendayagunakan sumber daya yang ada secara mandiri, maka kawasan perbatasan yang mempunyai potensi sangat besar dapat dijadikan aset untuk pembangunan daerah. Disamping itu, kawasan perbatasan akan memberikan peluang bagi peningkatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi dengan *Existing Models*. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang akan dikumpulkan bersifat data lunak (*soft*), penekanan pada deskripsi-deskripsi tentang orang, tempat dan percakapan dan tidak menekankan penggunaan prosedur statistik. Fenomenologi digunakan karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan masuk ke dalam dunia konseptual subyek guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana dan apa makna yang disusun subyek di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan kesehariannya. Pendekatan kualitatif fenomenologi merupakan cara pendekatan yang menekankan pada kondisi alami (*naturalistic*), kerja lapangan, dan instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri dan lebih banyak pengungkapan

bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi pusat perhatian adalah fenomena-fenomena yang tampak maupun gejala-gejala yang melatarbelakanginya berdasarkan pemahaman subyektif dari peneliti itu. Sedangkan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan penggambaran peristiwa pada saat itu, pendekatan penelitian ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1982), yaitu:

1. Latar penelitian sebagai sumber data bersifat alamiah dan peneliti berperan sebagai instrumen utama.
2. Bersifat deskriptif
3. Lebih menekankan pada proses daripada hasil
4. Data yang dianalisis bersifat induktif
5. Pemaknaan dalam konteks menjadi perhatian utama

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dengan komponen-komponen antara lain: pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan yang merupakan penarikan/verifikasi data dan penyajian data (Huberman, 1992:20).

## HASIL

Model dan Strategi Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat. Kebijakan pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kecamatan Entikong diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kawasan dengan pengelolaan sumber daya secara optimal melalui sistem agribisnis. Ada dua kelompok komoditas tanaman yang dapat dikembangkan dalam pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kecamatan



Entikong, yaitu kelompok tanaman tahunan dan tanaman semusim. Termasuk dalam kelompok tanaman tahunan adalah seperti karet, kelapa (kopra), kelapa sawit (cpo), kopi, teh, lada, cengkeh, kakao, jambu mete, kapok, pala, kayu manis, vanili, kemiri, pinang, kapu laga dan asam jawa. Sedangkan yang masuk dalam kelompok tanaman semusim adalah seperti tebu, tembakau, kapas, jarak, serah wangi, serat karung, nilam dan jahe (BNPP, 2010).

Beberapa model pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kecamatan Entikong dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan komoditas.

1. Kawasan Perkebunan Murni (KPM), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi penyusunnya adalah hanya murni tanaman tahunan atau murni tanaman semusim, tidak ada tanaman lain yang sengaja ditanam selain tanaman tersebut.
2. Kawasan Perkebunan Campuran (KPC), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi penyusunnya merupakan gabungan antara tanaman tahunan dan tanaman semusim. Jadi dalam kawasan model ini, komoditas yang dipilih adalah gabungan satu atau beberapa jenis tanaman tahunan dan satu atau beberapa jenis tanaman semusim.
3. Kawasan Perkebunan Serbaguna (KPS), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi utamanya adalah tanaman kebun, baik itu jenis tanaman tahunan, maupun jenis tanaman semusim maupun campuran, tetapi di sela-selanya ditanami tanaman pertanian lain dan atau tanaman pakan perkebunan.
4. Kawasan Perkebunan Terpadu (KPT), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang

komoditas yang dipilih adalah gabungan antara tanaman pertanian, baik itu jenis tanaman tahunan maupun jenis tanaman semusim.

Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Perkebunan Rakyat. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan atau kelompok perkebunan ini dibedakan menjadi empat (4) tahap, yaitu:

1. Pembinaan Kelas Belajar-mengajar.

Disini kelompok perkebunan merupakan wadah bagi anggota untuk berinteraksi guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta ambisi, kemampuan dan usaha dalam beragribisnis yang lebih baik, menguntungkan dan mandiri. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Mengadakan pertemuan rutin yang berkelanjutan untuk mendiskusikan pengetahuan dan ketrampilan serta pengalaman dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan teknologi, budidaya, penyediaan sarana produksi, pemasaran, dan analisis usaha; b) Mengundang para nara sumber ahli dari Dinas Perkebunan, perusahaan swasta, koperasi, BUMN/BUMD atau lembaga keuangan sebagai pembicara.; c) Mengembangkan kader kepemimpinan di kalangan anggota; d) Mengikuti pelatihan atau kursus yang diperlukan dalam upaya peningkatan usaha tani kelompok.

2. Pengembangan Kelembagaan sebagai Unit Produksi.

Usaha tani dari masing-masing kelompok perkebunan secara keseluruhan dipandang sebagai satu unit produksi, sehingga dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi yang berwawasan agribisnis.





Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Merencanakan dan menentukan pola usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, pemasaran, sarana produksi, dan sumber daya alam;
  - b) Menyusun rencana usaha seperti: Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang didalamnya termasuk rencana permodalan dan gerakan bersama;
  - c) Melaksanakan kegiatan untuk kepentingan bersama seperti menerapkan teknologi tepat guna yang telah disepakati, pengadaan sarana produksi, pemasaran, pemberantasan hama penyakit dan pelestarian sumber daya alam;
  - d) Menganalisis dan menilai usaha tani yang dilaksanakan serta merumuskan perbaikan dan peningkatannya.
3. Pembinaan Kelembagaan sebagai Wahana Kerjasama.

Dalam hal ini, kelompok merupakan tempat memperkuat diantara sesama perkebunan dalam satu kelompok dan antar kelompok dengan pihak lain untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Menetapkan kesepakatan atau ketentuan yang wajib diikuti atau dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok beserta sanksi bagi anggota kelompok yang melanggarnya; b) Mengadakan pembagian tugas, baik pengurus maupun anggota kelompok, sehingga seluruh anggota kelompok dapat berperan dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya; c) Menjalankan administrasi kelompok secara tertib, yang meliputi catatan anggota kelompok, inventarisasi kekayaan kelompok, hasil-hasil pertemuan, keuangan, surat-menyurat dan buku tamu; d) Meningkatkan kelompok menjadi kelompok usaha bersama agribisnis yang terintegrasi menjadi kelompok perkebunan.

4. Pembinaan Kelembagaan sebagai Kelompok Usaha.

Dalam pembinaan kelompok ini, segala kemampuan yang dimiliki diarahkan agar mampu memanfaatkan berbagai kesempatan berusaha serta peningkatan usaha kearah komersial, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah memperhitungkan untung dan ruginya. Pembinaan ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) Menganalisis potensi pasar dan peluang untuk mengembangkan komoditas yang lebih menguntungkan; b) Menganalisis potensi wilayah, komoditas apa yang dapat dikembangkan sesuai dengan tersedianya pasar yang memberikan keuntungan berusaha; c) Melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan swasta, koperasi, maupun BUMN untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian model pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kecamatan Entikong dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan komoditas.

1. Kawasan Perkebunan Murni (KPM)
2. Kawasan Perkebunan Campuran (KPC)



3. Kawasan Perkebunan Serbaguna (KPS)
4. Kawasan Perkebunan Terpadu (KPT).

Dari empat model di atas maka berikutnya akan dilakukan pembinaan dengan empat tahapan diantaranya:

1. Pembinaan Kelas Belajar-mengajar.
2. Pengembangan Kelembagaan sebagai Unit Produksi
3. Pembinaan Kelembagaan sebagai Wahana Kerjasama
4. Pembinaan Kelembagaan sebagai Kelompok Usaha

Perbatasan Entikong memiliki berbagai potensi kegiatan ekonomi sudah sejak lama dimiliki, namun kondisi tersebut belum berkembang sebagai sebuah kawasan yang memiliki keuntungan. Sebagai poin penting dari kedekatan secara geografis dengan negara tetangga. Melalui model dan pembinaan masyarakat dalam mengelola komoditi local di Entikong memberi dampak yang sangat baik bagi masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## PENUTUP

Model pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kecamatan Entikong dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan komoditas yaitu: Kawasan Perkebunan Murni (KPM), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi penyusunnya adalah hanya murni tanaman tahunan atau murni tanaman semusim, tidak ada tanaman lain yang sengaja ditanam selain tanaman tersebut; Kawasan Perkebunan Campuran (KPC), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi penyusunnya merupakan gabungan antara tanaman tahunan dan tanaman semusim. Jadi dalam kawasan model ini, komoditas yang dipilih adalah gabungan satu atau

beberapa jenis tanaman tahunan dan satu atau beberapa jenis tanaman semusim; Kawasan Perkebunan Serbaguna (KPS), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang vegetasi utamanya adalah tanaman kebun, baik itu jenis tanaman tahunan, maupun jenis tanaman semusim maupun campuran, tetapi di sela-selanya ditanami tanaman pertanian lain dan atau tanaman pakan perkebunan; Kawasan Perkebunan Terpadu (KPT), yaitu kawasan perkebunan rakyat yang komoditas yang dipilih adalah gabungan antara tanaman pertanian, baik itu jenis tanaman tahunan maupun jenis tanaman semusim

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri. M., dan Suhandoyo. 1999. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi*. Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT Press
- Alqadrie, S. I., 1991. *Hubungan Sosial Budaya Masyarakat Kalbar Dengan Serawak Malaysia*. Makalah Dalam Simposium Kerja Sama ASEAN Dalam Menghadapi Era Persaingan Bebas. Pontianak: Fisipol Untan.
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 2010. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011–2025*. Jakarta: BNPP.
- BKPM. 2011. *Kajian Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan*.
- Bogdan, R. C., dan Sari. B. K., 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.



- Dimiyati, M., 2004. *Belajar Meneliti Secara Kualitatif Siapa Takut*. Malang: Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Entikong. 2014. Profil Kecamatan Entikong.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Huberman, A.M and Milles, M.B. 1987. *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*, London New Delhi, Sage Publications.
- Huberman, A.M and Milles, M.B., 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Husnadi, 2006. *Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara*. Tesis tidak diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro Semarang.
- Irsan, R. 2007. *Pengaruh Jalan Lintas Batas Kalimantan Barat – Serawak Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kerusakan Lingkungan Hutan (Kasus di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Kabupaten Sanggau Dalam Angka. 2013. Badan Pusat Statistik.
- Kompas. 2003. *Indonesia Bangsaku, Ringgit Uangku*. 21 Maret 2003.
- Kurniadi, B. D., 2009. *Yogyakarta in Decentralized Indonesia, Integrating Traditional Institutions into a Democratic Republic*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No. 2, November 2009
- Lembaga Administrasi Negara. 2004. *Kajian Manajemen Kawasan Perbatasan Negara*. Laporan Penelitian, Pusat Kajian Administrasi Internasional. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mulyana. A., 2012. *Kebijakan Umum dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan. Presentasi dalam Diskusi Masalah, Kebijakan, dan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Niebuhr, A and Stiller, S. 2001. *Integration Effect in Border Regions – A Survey of Economic Theory and Empirical Studies*. HWWA Discussion Paper. Hamburg. Noble, B. F. 2000. Institutional Criteria for Co- Management. Policy. 24(1), 69–77.
- Paparan Bupati Sanggau Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Khusus di Kabupaten Sanggau. Jakarta: 25 April 2007.
- Potensi dan Permasalahan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat. 2006. *Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Propinsi Kalimantan Barat*.



Potensi dan Permasalahan Obyek Wisata Kawasan Perbatasan Antar Negara di Propinsi Kalimantan Barat. 2008. *Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Propinsi Kalimantan Barat.*

Taufik. T. A., 2005. *Penguatan Daya Saing Dengan Platform Klaster Industri: Prasyarat Memasuki Ekonomi Modern.* Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi dan Implementasi Pengembangan Daya Saing Ekonomi Daerah Dengan Pendekatan Lintas Sektor. Yogyakarta, 7-9 Pebruari 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. *Tentang Penataan Ruang*

